



# **RENCANA KINERJA TAHUN 2024**

**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULENG**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Singaraja, 18 Januari 2023

Mengetahui:

Inspektor Daerah Kabupaten Buleleng



I Putu Karuna, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660602 199403 1 011

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 34 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2024

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Landasan Hukum.....	2
1.3    Maksud dan Tujuan.....	3
1.4    Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU....	5
2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2    Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3    Isu-isu Penting Penyelenggaran Tupoksi Perangkat Daerah.....	14
2.4    Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....	17
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	26
3.1    Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	26
3.2    Program dan Kegiatan.....	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	29
BAB V PENUTUP.....	37

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023.....	6
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	13
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024....	18
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025....	30

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Hal tersebut disusun dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara berkaitan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 7 menyatakan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (PD) wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis PD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang mana penyusunannya memperhatikan kewenangan lembaga dan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang agar tercipta keterpaduan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut di atas, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja tahun 2024 merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalisasikan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Inspektorat Daerah

Kabupaten Buleleng, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 – 2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 – 2026, yaitu : “Terwujudnya Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat ”

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja/ Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang RI. No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang RI. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Perda Kabupaten Buleleng No.3 Tahun 2013 Tentang RPJPD Kabupaten Buleleng 2005- 2025

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud**

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi dan Kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan antar bidang secara efektif dan efisien, terciptanya harmonisasi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan selama kurun waktu 1 tahun dan terciptanya koordinasi antar bagian yang ada serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.

#### **Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 adalah sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJM Daerah, serta dasar/acuan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng setiap tahun;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam dapat tercapai;
3. Untuk menjabarkan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 serta merealisasikannya dalam perencanaan tahunan Inspektorat selama kurun waktu 1 tahun;
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Menjadi kerangka dasar bagi Inspektorat dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

6. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama lima tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika dari Penulisan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematikan Penulisan

##### BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD PADA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

##### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

##### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

##### BAB V PENUTUP

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Evaluasi Pelaksanaan kegiatan rencana kerja yang pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2022 dan tahun berjalan 2023 bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan- kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut RENJA Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2022 rata-rata capaian kinerja mencapai 96,52 %. Pencapaian kinerja tersebut di dukung melalui pelaksanaan 3 Program dan 11 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2022 didukung dengan dana sebesar Rp 11.562.048.607 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.758.127.145 (93,05%) dengan capaian kinerja 96,52% .

Sedangkan rata-rata capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I sebesar 15,86%. Adapun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng TA. 2023 yang terdiri dari : 3 program, 11 kegiatan dan 32 sub.kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 10.514.981.503,00

dengan realisasi sampai dengan Semester I tahun 2023 sebesar Rp.1.626.984.310,00 (31,52%)

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 125.327.900,00 dengan realisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2023 sebesar Rp. 9.600.000,00 (16,67%)
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan anggaran sebesar Rp. 151.457.535,00 dengan realisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2023 sebesar Rp. 2.400.000 (1,39%)

Jadi Total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.10.791.766.938,00 dengan realisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2023 sebesar Rp. 1.638.984.310,00 (16,53%) dengan rata-rata capaian kinerja 15,86%. Terkait Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan Tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s.d  
Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9) 11=(10/4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pelayanan public	100 %	100 %	100	99,96	100%	100 %	299,9631 2,9996
Keg.Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	5 %	5 %	5	5	100%	5 %	15 3
Sub.Keg.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah Yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	5	5	100%	5 dokumen	15 3
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100	100	100%	100 %	300 3
Sub.Keg.Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan	40 orang	40 orang	40	40	100%	50 orang	130 3,25
Sub.Keg.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 dokumen	12 dokumen	12	12	100%	12 dokumen	36 2,77

Sub.Keg.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0 Laporan	1	1	100%	1 Laporan	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang mendukung tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>10000%</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>201</b>	<b>2,01</b>
Sub.Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 paket	0 paket	12	12	100%	1 paket	<b>13</b>	<b>4,33333 333</b>
Sub.Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Orang	12 Orang	33	33	100%	20 Orang	<b>65</b>	<b>3,25</b>
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang mendukung Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>201</b>	<b>2,01</b>
Sub. Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	2 paket	5	5	100%	1 paket	<b>8</b>	<b>8</b>
Sub.Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 paket	0 paket	4	4	100%	5 paket	<b>9</b>	<b>1,8</b>
Sub.Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	7 paket	5 paket	25	25	100%	7 paket	<b>37</b>	<b>5,29</b>
Sub.Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2 paket	2 paket	6	6	100%	2 paket	<b>10</b>	<b>5</b>
Sub.Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 dokumen	5 dokumen	2	2	100%	2 dokumen	<b>9</b>	<b>4,5</b>
Sub. Keg. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	2 laporan	2	2	100%	12 laporan	<b>16</b>	<b>1,33</b>
Sub.Keg.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	226 laporan	12	12	100%	12 laporan	<b>250</b>	<b>20,83</b>

<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah</b>	100 %	0 %	100	100	100%	1 %	101	1,01
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	0 Unit	1	1	100%	0 Unit	1	1
Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Mebel	13 unit	0 unit	3	3	100%	1 unit	4	0,31
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah</b>	100 %	100 %	100	99,741379 31	100%	100 %	299,7413 8	2,997
Sub.Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkelolanya surat masuk dan keluar	12 laporan	290 0 laporan	2900	2870	99%	12 laporan	5782	481,83
Sub.Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	39 laporan	48	48	100%	12 laporan	99	8,25
Sub.Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	2 laporan	2	2	100%	12 laporan	16	1,33
Sub.Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	50 laporan	69	69	100%	12 laporan	131	10,92
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100 %	100 %	100	10000%	100%	100 %	201	2,01
Sub.Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31 Unit	30 Unit	31	31	100%	31 Unit	92	2,97

Sub.Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	<b>1</b>	<b>Unit</b>	<b>0</b>	<b>Unit</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>Unit</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Persentase Tindak Lanjut Temuan Pengawaan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>300</b>	<b>3</b>
Keg.Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Percentase Pengawasan Internal yang dilaksanakan	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>201</b>	<b>2,01</b>
Sub.Keg.Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16	laporan	0	laporan	4	4	<b>100%</b>	4	laporan	<b>8</b>	<b>0,5</b>
Sub.Keg.Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8	Laporan	8	Laporan	8	8	<b>100%</b>	8	Laporan	<b>24</b>	<b>3</b>
Sub.Keg.Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	5	Laporan	40	Laporan	1	1	<b>100%</b>	1	Laporan	<b>42</b>	<b>8,4</b>
Sub.Keg.Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	4	laporan	40	laporan	1	1	<b>100%</b>	1	laporan	<b>42</b>	<b>10,5</b>
Sub.Keg.Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	4	laporan	0	laporan	4	4	<b>100%</b>	4	laporan	<b>8</b>	<b>2</b>
Sub.Keg. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	24	dokumen	0	dokumen	24	24	<b>100%</b>	16	dokumen	<b>40</b>	<b>1,66666 667</b>
<b>Keg.Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>201</b>	<b>2,01</b>
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12	Laporan	12	Laporan	12	12	<b>100%</b>	12	Laporan	<b>36</b>	<b>3</b>
Sub.Keg.Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	24	Laporan	12	Laporan	28	28	<b>100%</b>	12	Laporan	<b>52</b>	<b>2,17</b>
<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase OPD yang mendapatkan Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>201</b>	<b>2,01</b>
Keg.Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Percentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100	%	100	%	100	100	<b>100%</b>	100	%	<b>201</b>	<b>2,01</b>

Sub.Keg.Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	12	rekomen dasi	12	rekomend asi	12	12	100%	12	rekomen dasi	<b>36</b>	<b>3</b>
<b>Keg.Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>201</b>	<b>2,01</b>
Sub.Keg.Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	<b>40</b>	<b>PD</b>	<b>12</b>	<b>PD</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>40</b>	<b>PD</b>	<b>64</b>	<b>1,6</b>
Sub.Keg.Pendampingan,Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	40	PD	0	PD	40	40	100%	40	PD	<b>80</b>	<b>2</b>
Sub.Keg.Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12	kegiatan	12	kegiatan	12	12	100%	12	kegiatan	<b>36</b>	<b>3</b>
Sub.Keg.Pendampingan,Asistensi, dan Verifikasi, Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi,dan Verifikasi, Penegakan Integritas	-	KALI	0	KALI	0	0		-	KALI		

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.**

Pada dasarnya kegiatan yang telah ditetapkan terdiri dari 3 program, 11 kegiatan, dan 33 sub kegiatan. Dari ke 3 program yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota terdiri dari 7 kegiatan dengan 21 sub kegiatan, Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 kegiatan dengan 8 sub kegiatan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri dari 2 kegiatan dengan 4 sub kegiatan.

Pada umumnya Program, kegiatan dan sub kegiatan telah dapat dilaksanakan secara optimal atau berhasil dengan baik. Ini terbukti dari perhitungan Pengukuran Kinerja Kegiatan dapat dilihat bahwa ada 11 kegiatan dengan 33 sub kegiatan tingkat capaian target keluaran mencapai 100 % dan 2 sub kegiatan tidak mencapai 100 % bila dilihat dari perhitungan anggaran pada tiap-tiap kegiatan, namun secara keseluruhan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan rata-rata capaian kinerjanya mencapai 96,52 %. Terkait dengan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah disajikan dengan Tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng**

No	Indikator	Target IKU	Targer Renstra Perangkat Daerah				Proyeksi Tahun 2023	Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB	40 OPD	40 OPD	40 OPD	40 OPD	40 OPD	40 OPD	
2.	Persentase OPD dengan Maturitas SPIP minimal Level 3 (terdefinisikan)	25%	25%	50%	75%	100%	25%	
3.	Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng Level 3 (integrated)	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pembentukan kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng maka Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.

Dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paradigma Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat Daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
5. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri. PKPT disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan sumberdaya manusia sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran tidak terjadi. Ruang lingkup dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ini meliputi:

1. Pemeriksaan Reguler (*Current Issues*)

Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap SKPD dan desa.

2. Pemeriksaan Non Reguler

Pemeriksaan Non reguler adalah pemeriksaan di luar PKPT

3. Kegiatan Reviu-Reviu dan Evaluasi yaitu :

- a) R<sup>e</sup>viu LKPD SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b) E<sup>v</sup>aluasi LkjIP SKPD dan ReviewLKjIP;
- c) R<sup>e</sup>viu Pengadaan Barang/Jasa;
- d) Review RKA/DPA SKPD;
- e) Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);
- f) Peningkatan maturitas SPIP;
- g) Peningkatan Leveling APIP;
- h) Penilaian RB dan Zona Integritas;;

Selain itu juga melaksanakan Tindak Lanjut atas temuan APIP, BPK Perwakilan Provinsi Bali, BPKP Perwakilan Provinsi Bali, dan Inspektorat Provinsi Bali,

Faktor-faktor secara umum yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- 1) Adanya komitmen pimpinan untuk memperkuat dan mengedepankan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai penjamin kualitas, konsultan bagi tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
- 2) Adanya kesadaran masyarakat untuk memberi laporan pengaduan terhadap apa yang dipersangkakan sebagai penyelewengan.
- 3) Adanya kerja sama yang baik antara Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dengan Instansi terkait di bidang Pengawasan.

Kendala-kendala yang menghambat pencapaian rencana kinerja ini adalah:

- 1) Masih adanya obrik yang belum menindaklanjuti rekomendasi / hasil temuan pada waktu yang telah ditentukan.
- 2) Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh obrik kadang – kadang tidak sesuai dengan rekomendasi yang diharapkan.
- 3) Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut belum dilakukan secara optimal, hal ini juga disebabkan karena keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala – kendala yang merupakan penghambat dalam pencapaian rencana kinerja antara lain:

- 1) Koordinasi dengan obrik agar temuan – temuan yang belum ditindaklanjuti segera ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang tidak sesuai agar disesuaikan dengan rekomendasi.
- 2) Orientasi dan peningkatan kualitas teknis pengawasan.
- 3) Pemutahiran Data hasil pemeriksaan internal dan ekternal.

- 4) Perlu dilakukan penekanan pada saat pengawasan kepada SKPD bahwa Inpektorat Daerah fungsinya melakukan pembinaan, konsultasi dan penjaminan kualitas.
- 5) Melakukan pembinaan/pembenahan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak eksternal

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.**

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Terkait Review Terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan dengan Tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C 31  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Buleleng

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get Capai an	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12	
06.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN</b>	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pelayanan publik	100 %	12.405.665.00	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN</b>	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pelayanan publik	100%	12.405.665.00		
06.01.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	100 %	2.220.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	100%	2.220.000		
06.01.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun	5 Dokumen	2.220.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun	5 Dokumen	2.220.000		
6.01.01.2. 02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100 %	8.926.413.594	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	8.926.413.594		
6.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	8.491.621.442	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	8.491.621.442		
6.01.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	433.682.152	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	433.682.152		

6.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.110.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.110.000	
6.01.01.2. 05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang mendukung tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah</b>	100 %	<b>1.004.399.200</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang mendukung tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah</b>	100%	<b>1.004.399.200</b>	
6.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	4.129.200	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	4.129.200	
6.01.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	1.000.270.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	1.000.270.000	
6.01.01.2. 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang mendukung Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah</b>	100 %	1.212.559.670	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang mendukung Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah</b>	100%	1.212.559.670	

6.01.01.2.0 6.0001	Sub. Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.382.600	Sub. Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.382.600	
6.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	115.647.570	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	115.647.570	
6.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.263.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.263.500	
6.01.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.790.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.790.000	
6.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	38.850.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	38.850.000	
6.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan <b>100%</b>	1.023.626.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan <b>100%</b>	1.023.626.000	

<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah</b>	12 Laporan	29.200.000	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah</b>	12 Laporan	29.200.000	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	29.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	29.200.000	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	129.948.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	129.948.000	
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	283.308.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	283.308.000	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	467.040.246	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	467.040.246	

<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	31	350.576.290	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	31	350.576.290	
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	347.892.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	347.892.400	
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	<b>100%</b>	2.683.890	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	<b>100%</b>	2.683.890	
<b>06.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran</b>	<b>Persentase Tindak Lanjut Temuan Pengawaan</b>	<b>100%</b>	1.861.420.000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran</b>	<b>Persentase Tindak Lanjut Temuan Pengawaan</b>	<b>100%</b>	1.861.420.000	
<b>6.01.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran</b>	<b>Persentase Pengawasan Internal yang dilaksanakan</b>	16	1.168.510.000	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran</b>	<b>Persentase Pengawasan Internal yang dilaksanakan</b>	16	1.168.510.000	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8	82.660.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8	82.660.000	

6.01.02.2.0 1.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan	413.300.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan	413.300.000	
6.01.02.2.0 1.0003	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4 Laporan	42.285.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4 Laporan	42.285.000	
6.01.02.2.0 1.0004	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4 Laporan	42.285.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4 Laporan	42.285.000	
6.01.02.2.0 1.0005	Pengawasan Desa	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	24 Dokumen	267.370.000	Pengawasan Desa	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	24 Dokumen	267.370.000	
6.01.02.2.0 1.0007	Sub.Keg. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100 %	320.610.000	Sub.Keg. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100%	320.610.000	
<b>6.01.02.2. 02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Kab. Buleleng, Buleleng,</b>	<b>Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>692.910.000</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Kab. Buleleng, Buleleng,</b>	<b>Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>692.910.000</b>	

6.01.02.2.0 2.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	24 Laporan	14.430.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	24 Laporan	14.430.000	
6.01.02.2.0 2.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 %	678.480.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	678.480.000	
06.01.03	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran</b>	<b>Percentase OPD yang mendapatkan Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>100 %</b>	732.915.000	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran</b>	<b>Percentase OPD yang mendapatkan Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>100%</b>	732.915.000	
6.01.03.2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	12 Rekomendasi	529.995.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Percentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	12 Rekomendasi	529.995.000	
6.01.03.2.0 1.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	100 %	529.995.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	100%	529.995.000	
6.01.03.2. 02	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Percentase Pendampingan dan Asistensi	40 Perangkat Daerah	202.920.000	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Percentase Pendampingan dan Asistensi	40 Perangkat Daerah	202.920.000	

6.01.03.2.0 2.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 Perangkat Daerah	50.340.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 Perangkat Daerah	50.340.000	
6.01.03.2.0 2.0002	Pendampingan,Asistensi,Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	12 Kegiatan	26.610.000	Pendampingan,Asistensi,Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	12 Kegiatan	26.610.000	
6.01.03.2.0 2.0003	Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	125.970.000	Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Buleleng, Buleleng, Kendran	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	125.970.000	

### **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.**

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan Visi dan Misi. Melalui Tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan Visi dan Misi. Sedangkan Sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja dimasing-masing tujuan.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng merumuskan Tujuan yang terkait dengan misi, yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng merumuskan tujuan, sasaran sebagai berikut:

**Tujuan :** Meningkatnya kualitas pengawasan

**Sasaran :** Meningkatnya kualitas pengawasan internal yang akuntabel.

Indikator Tujuan/Sasaran :

1. OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB
2. Persentase OPD
3. Level Kapabilitas APIP Kabupaten Buleleng Level 3 (Integrated)

#### **3.2. Program dan Kegiatan :**

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng terdiri dari 3 Program, 10 kegiatan dan 30 sub kegiatan.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk strategi pencapaian sasaran, yaitu:

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota**

- 1). Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

- 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2). Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah
  - 2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
  - 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3). Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - 3.2 Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 4). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 4.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - 4.4 Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
- 5). Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 5.2 Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
  - 5.3 Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor
  - 5.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

- 1). Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
  - 1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
  - 1.2 Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Perangkat Daerah
  - 1.3 Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
  - 1.4 Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
  - 1.5 Sub Kegiatan Pengawasan Desa
- 2). Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
  - 2.1 Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
  - 2.2 Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

## **3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasandan Fasilitasi Pengawasan
  - 1.1 Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
  - 1.2 Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.3 Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Evaluasi serta Penilaian Reformasi Birokrasi
  - 1.4 Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang dirancang Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 terdiri atas 3 program, 10 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Dari ke 3 program yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota terdiri dari : 7 kegiatan dengan 18 sub kegiatan, Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 kegiatan dengan 8 sub kegiatan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri dari 1 kegiatan dengan 4 sub kegiatan yang di dukung dengan jumlah pagu indikatif sebesar Rp. 15.000.000.000,-. Rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C.33

**Tabel T-C33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Kabupaten Buleleng**

<b>Kode</b>	<b>Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program /Kegiatan</b>	<b>Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)</b>				<b>Catatan Penting</b>	<b>Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025</b>	
			<b>Lokasi</b>	<b>Target Capaian Kinerja</b>	<b>Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif</b>	<b>Sumber Dana</b>		<b>Target Capaian Kinerja</b>	<b>Kebutuhan Dana/Pagu</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN</b>		Kabupaten Buleleng	100%	<b>12.405.665.000</b>			100%	<b>13.646.231.500</b>
06.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD	Kabupaten Buleleng	100%	<b>2.220.000</b>			100%	<b>2.442.000</b>
06.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah Yang disusun	Kabupaten Buleleng	100%	2.220.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	2.442.000
6.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Buleleng	100%	<b>8.926.413.594</b>			100%	<b>9.819.054.953</b>
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan	Kabupaten Buleleng	100%	8.491.621.442	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH		100%	<b>9.340.783.586</b>

6.01.01.2.02. 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Buleleng	<b>100%</b>	433.682.152	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		<b>100%</b>	<b>477.050.367</b>
6.01.01.2.02. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Buleleng	<b>100%</b>	1.110.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		<b>100%</b>	<b>1.221.000</b>
<b>6.01.01.2.0 5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang mendukung tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	<b>1.004.399.200</b>			<b>100%</b>	<b>1.104.839.12 0</b>
6.01.01.2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Buleleng	<b>100%</b>	4.129.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		<b>100%</b>	<b>4.542.120</b>
6.01.01.2.05. 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Buleleng	<b>100%</b>	1.000.270.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		<b>100%</b>	<b>1.100.297.00 0</b>
<b>6.01.01.2.0 6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang mendukung Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	<b>1.212.559.670</b>			<b>100%</b>	<b>1.333.815.63 7</b>
6.01.01.2.06. 0001	Sub. Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Buleleng	<b>100%</b>	17.382.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		<b>100%</b>	<b>19.120.860</b>

6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Buleleng	<b>100%</b>	115.647.570	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		<b>100%</b>	<b>127.212.327</b>
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Buleleng	<b>100%</b>	14.263.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		<b>100%</b>	<b>15.689.850</b>
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianyan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	2.790.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		<b>100%</b>	<b>3.069.000</b>
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	38.850.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		<b>100%</b>	<b>42.735.000</b>
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	1.023.626.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		<b>100%</b>	<b>1.125.988.600</b>
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	<b>909.496.246</b>			<b>100%</b>	<b>1.000.445.871</b>
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkelolanya surat masuk dan keluar	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	29.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM,		<b>100%</b>	<b>32.120.000</b>

						PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	129.948.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<b>100%</b>	<b>142.942.800</b>
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	283.308.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	<b>100%</b>	<b>311.638.800</b>
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	467.040.246	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	<b>100%</b>	<b>513.744.271</b>
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	<b>350.576.290</b>		<b>100%</b>	<b>385.633.919</b>
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	347.892.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	<b>100%</b>	<b>382.681.640</b>

6.01.01.2.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	2.683.890	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		<b>100%</b>	<b>2.952.279</b>
<b>06.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>		<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	<b>1.861.420.000</b>			<b>100%</b>	<b>2.047.562.000</b>
<b>6.01.02.2.0 1</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>		<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	<b>1.168.510.000</b>			<b>100%</b>	<b>1.285.361.000</b>
6.01.02.2.01. 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	82.660.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		<b>100%</b>	<b>90.926.000</b>
6.01.02.2.01. 0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	413.300.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		<b>100%</b>	<b>454.630.000</b>
6.01.02.2.01. 0003	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	42.285.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		<b>100%</b>	<b>46.513.500</b>
6.01.02.2.01. 0004	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	42.285.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		<b>100%</b>	<b>46.513.500</b>
6.01.02.2.01. 0005	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	267.370.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		<b>100%</b>	<b>294.107.000</b>

6.01.02.2.01. 0007	Sub.Keg. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	320.610.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).		<b>100%</b>	<b>352.671.000</b>
<b>6.01.02.2.0 2</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan</b>	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	<b>692.910.000</b>			<b>100%</b>	<b>762.201.000</b>
6.01.02.2.02. 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	14.430.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		<b>100%</b>	<b>15.873.000</b>
6.01.02.2.02. 0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	678.480.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		<b>100%</b>	<b>746.328.000</b>
<b>06.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase OPD yang mendapatkan Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	<b>732.915.000</b>			<b>100%</b>	<b>806.206.500</b>
<b>6.01.03.2.0 1</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	<b>529.995.000</b>			<b>100%</b>	<b>582.994.500</b>
6.01.03.2.01. 0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	529.995.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		<b>100%</b>	<b>582.994.500</b>

<b>6.01.03.2.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	<b>202.920.000</b>			<b>100%</b>	<b>223.212.000</b>
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	50.340.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		<b>100%</b>	<b>55.374.000</b>
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan,Asistensi,Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi,Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	26.610.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		<b>100%</b>	<b>29.271.000</b>
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>100%</b>	125.970.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		<b>100%</b>	<b>138.567.000</b>

**BAB IV****P E N U T U P**

Dengan adanya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai Visi dan Misi, Kepala Daerah, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD.

Rencana Kerja ini substansinya memuat tentang Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang nantinya menjadi acuan di dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Disamping itu, Renja ini juga sebagai acuan/pedoman di dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Mudah-mudahan target yang direncanakan dapat direalisasikan melalui prinsip pengawasan, transparan, akuntabel, efisien, efektif, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai institusi yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pengawas daerah yang dituntut untuk dapat selalu meningkatkan kapasitasnya di bidang pengawasan.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 ini disusun semoga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat. Namun disadari masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusun Renja ini.

Singaraja, 18 Januari 2023

Mengetahui:

Inspektor Daerah Kabupaten Buleleng



I Putu Karuna, S.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660602 199403 1 011